

Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Perbup No. 41 Tahun 2022)

Siti Nurhidayah, Tri Yuningsih, Titik Djumiarti

**Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (027) 7465407 Faksimile (024)7465402

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa Kabupaten Wonogiri yang memiliki prestasi di berbagai bidang baik akademik atau non akademik, tujuannya untuk memotivasi para pemuda di Kabupaten Wonogiri agar lebih prestatif. Namun dalam implementasinya para penerima penghargaan justru banyak yang tidak memberikan kontribusinya terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Adanya aktor yang belum menjalankan perannya dengan baik menunjukkan bahwa jaringan aktor yang ada belum berjalan dengan baik. Tujuan Penelitian ini yakni untuk menggambarkan Jaringan aktor yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model jaringan aktor yang terbentuk dalam implementasi kebijakan ini adalah Pentahelix atau melibatkan 5 aktor yakni pemerintah (Disporapar, Pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan OPD), swasta (PT Azmedia), Imapres Wonogiri, Media (Radio Giri swara, Solopos, Website resmi Pemkab Wonogiri), dan Masyarakat. Dalam hal komunikasi dan koordinasi masih menemui kendala khususnya dengan aktor Imapres Wonogiri.

Kata Kunci: Aktor, Implementasi, Jaringan Aktor, Pemuda Berprestasi, Stakeholders

ABSTRACT

The Award Program for Outstanding Youth in Wonogiri Regency is a form of appreciation for students in Wonogiri Regency who have achievements in various fields, both academic and non-academic. The goal is to motivate the youth in Wonogiri Regency to be more proactive. However, in its implementation, many award recipients did not contribute significantly to the development of Wonogiri Regency. The presence of actors who did not fulfill their roles effectively indicates that the existing actor network has not been optimally functioning. The purpose of this research is to describe the actor network formed in the implementation of the award program for outstanding youth in Wonogiri Regency. The method used is qualitative descriptive. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of this research show that the actor network model formed in the implementation of this policy is the Pentahelix, involving 5 actors: government (Disporapar, Imapres Wonogiri, sub-district government, village government, and regional offices), private sector (PT Azmedia), Imapres Wonogiri, media (Radio Giri Swara,

Solopos, Official Website of Wonogiri Regency), and the community. Communication and coordination face challenges, particularly with the Imapres Wonogiri actor.

Keywords: *Actors, Actor Network, Implementation, Outstanding Youth, Stakeholders*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah rencana aksi yang disepakati secara global dan disepakati oleh para tokoh dunia, termasuk Indonesia, untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Salah satu tujuan SDGs yang keempat adalah mewujudkan Pendidikan yang berkualitas. Menurut Laporan *World Population Review* jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,5 juta jiwa. Sedangkan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa di tahun 2022. Angka itu meningkat 1,13 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 272,68 juta jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia tentu harus dibarengi oleh kualitas sumber daya manusia yang

tinggi. Sebab adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan kualitas sumber daya manusia akan berdampak buruk bagi suatu negara. Hal ini juga masih menjadi permasalahan utama bagi bangsa Indonesia, dimana jumlah penduduk yang sangat tinggi belum diimbangi dengan kualitas yang unggul. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) skor negara Indonesia masih tertinggal dengan negara lainnya yakni menempati peringkat 114 di dunia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada tahun 2022 kurang lebih 72,91.

Salah satu provinsi terpadat di Indonesia adalah Jawa Tengah yang merupakan provinsi ketiga yang memiliki penduduk banyak di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia nya Provinsi Jawa Tengah tergolong sebagai daerah dengan kualitas SDM baik dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2020 meningkat. Sejak tahun 2017, tingkat pembangunan manusia di Jawa Tengah mencapai

"tingkat tinggi". kategori (IPM lebih dari 70), sedangkan tahun 2010–2016 masih dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$).

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki luas sekitar 1.793,67 km dan jumlah penduduk sekitar 1.043.576 jiwa. Kabupaten Wonogiri masih menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan yakni rendahnya kualitas SDM. Menurut data BPS tahun 2017, Kabupaten Wonogiri memiliki IPM paling rendah se- Eks Karesidenan Surakarta sebesar 67,76 persen, angka itu masih di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 69,55 persen (69,49 persen) di Jawa Tengah.

Adanya permasalahan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk lebih memperhatikan kualitas SDM di Wonogiri. Guna meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri pemerintah sedang gencar melaksanakan Panca Program yang meliputi "*Alus Dalane, Apik Pasare, Sehat Rakyat, Pinter Rakyat, dan Makmur Petanine*". Kelima program tersebut merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mana salah satu fokusnya yaitu "*Pinter Rakyat*" yang artinya Pintar masyarakatnya.

Untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalokasikan kurang lebih 20% dari keseluruhan APBD untuk bidang Pendidikan. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk memberikan apresiasi bagi Mahasiswa yang memiliki prestasi di Kabupaten Wonogiri melalui Program Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa Kabupaten Wonogiri yang memiliki prestasi di berbagai bidang baik akademik atau non akademik, tujuannya untuk memotivasi para pemuda di Kabupaten Wonogiri agar lebih prestatif sehingga harapannya bisa meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wonogiri.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kemudian ditahun 2018 sampai sekarang penghargaan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa Kabupaten Wonogiri yang berprestasi dan dinyatakan layak sesuai seleksi yang dilakukan.

Kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi ini tergolong inovasi baru yang belum

pernah ditemui di daerah-daerah lain. Untuk itu dalam pelaksanaannya pun memerlukan peran serta dari berbagai stakeholders. Adanya keterlibatan berbagai pihak inilah yang nantinya akan membentuk sebuah jejaring aktor.

Penerima penghargaan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan daerahnya. Namun dalam implementasinya para penerima penghargaan justru banyak yang tidak memberikan kontribusinya terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri, Hal ini dapat dilihat pada presentase jumlah mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang pasif dalam membantu mendukung Pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Pada sistem kerjasama pihak ketiga menunjukkan koordinasi antar aktor masih dinilai buruk. Hal ini karena Dinas Pendidikan tidak meninjau keterlibatan pihak ketiga sebagai bagian dari proses seleksi. Hal ini menjadikannya sebagai faktor yang menyebabkan perekrutan kandidat penghargaan yang tidak akurat dan sistem penilaian yang kurang transparan. Selain itu, kerugian dari praktik ini adalah ketika penghargaan diterima, mahasiswa berhenti berpartisipasi dan dengan demikian merasa dibebaskan dari kewajibannya

untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah (Nurhayati, 2022).

Dari keseluruhan penerima penghargaan belum semuanya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan kebijakan ini belum tercapai, yakni Meningkatnya kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri.

Mengingat kompleksnya permasalahan terkait pendidikan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan untuk pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri sebagai Langkah awal dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang jejaring aktor dalam pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan untuk pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui, mendeskripsikan, serta mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program pemberian penghargaan untuk pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri sebagai upaya meningkatkan mutu

SDM di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten Wonogiri karena Kabupaten Wonogiri merupakan daerah pertama yang menginisiasi adanya kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Terlepas dari itu kebijakan ini cukup menarik banyak perhatian daerah lain untuk turut menerapkan kebijakan yang sama. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih menemui beberapa hambatan, untuk itu pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian adalah “Mengapa Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri Belum Berjalan Optimal?”.

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Dalam perkembangan administrasi Negara mencakup aspek-aspek esensial, yaitu penyelenggaraan negara memiliki pemahaman terkait bagaimana suatu lembaga pemerintah tumbuh dan hidup untuk melaksanakan tugasnya. Seperti yang diwakili oleh Warella, Y. (1997), administrasi publik telah mengalami berbagai pasang surut dalam sejarah perkembangannya selama kurang lebih seratus tahun. Konsep dan teorinya terus berkembang. Salah satu misi utamanya sebagai “*the guardian*

of public interes” dan melayani secara prima kepada masyarakat serta sudah menjadi keinginan yang selalu ingin digapai. Pendapat Nicholas Henry (1988) ini masih bisa dijadikan acuan bagi upaya mencari perkembangan paradigma keilmuan pada penelitian administrasi publik. Henry mengklasifikasikan paradigma tersebut menurut fokus serta tempat perkembangannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah studi yang memiliki dua fokus utama yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Administrasi public juga dapat didefinisikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) seringkali mengacu pada perilaku satu atau beberapa aktor (pejabat pemerintah atau kelompok/instansi pemerintah) dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu. Dye (2017:1) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai keputusan apakah pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah, baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam merumuskan sebuah kebijakan diperlukan sebuah proses yang Panjang sehingga tercipta sebuah kebijakan yang baik. Proses kebijakan terdiri dari serangkaian tahap yang terdiri dari penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

C. Implementasi

Implementasi bisa didefinisikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) berpendapat "implementasi merupakan kelanjutan dari kegiatan yang saling menyesuaikan". Implementasi merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai dengan rencana sehingga dapat terwujud sebuah program sesuai tujuan dan harapan. Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu diperlukan adanya peran serta dari berbagai aktor, dimana hubungan antar aktor tersebut nantinya akan membentuk sebuah jaringan aktor.

D. Jejaring Aktor

Definisi jaringan aktor yakni, menunjukkan bahwa merepresentasikan jaringan, yang sebenarnya belum pasti demikian.

Teori jaringan aktor mencoba menjelaskan bagaimana asal-usul materi semiotik terkait dengan fungsi secara keseluruhan. serangkaian aktor yang terlibat dalam penciptaan makna (baik material maupun semiotik). Teori jaringan aktor atau *Aktor Network Theory* (ANT) dikenalkan oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law di tahun 1980-an. Teori ini berasal dari disiplin yang berurusan dengan objek yang merupakan bagian dari jaringan sosial, Yuniningsih (2018).

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh etzkowitz (1995) yang memberikan klasifikasi jaringan aktor berdasarkan jumlah aktor yang terlibat. Sebuah jaringan aktor dapat terbentuk berdasarkan jumlah aktor yang terlibat didalamnya, atau dikenal dengan konsep helix. Berdasarkan jumlah aktornya model jaringan aktor diklasifikasikan menjadi *Triple Helix*, *Quadruple helix*, dan *Pentahelix*.

E. Identifikasi Aktor

Aktor adalah seseorang, sekelompok orang atau lembaga tertentu yang memiliki kepentingan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan program. Aktor pada awalnya diidentikkan dengan istilah "*stakeholder*" yang digunakan dalam dunia bisnis (ekonomi), namun dengan

berkembangnya birokratis entrepreneurship negara, istilah “*stakeholder*” mulai mendapat penerimaan dalam dunia administrasi publik. telah melakukan banyak teori kehidupan bisnis lainnya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori identifikasi aktor yang dikemukakan oleh Blackman (2003) dimana aktor diklasifikasikan menjadi dua yakni aktor primer dan aktor sekunder. Teori ini dipilih karena relevan dengan topik penelitian dimana dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri hanya melibatkan dua pelaku utama yang dibedakan menjadi aktor primer dan aktor sekunder. Dimana setiap aktor tersebut memiliki peran nya masing-masing baik sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, akselerator maupun implementor.

F. Peran Aktor

Peran aktor didefinisikan sebagai tugas kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam implementasi sebuah kebijakan. Menurut Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017) stakeholder dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- a. *Policy creator* yaitu stakeholder yang memiliki peranan dalam mengambil keputusan serta menentukan sebuah kebijakan.
- b. Koordinator yaitu stakeholder yang perannya melakukan koordinasi dengan stakeholder lain.
- c. Fasilitator yaitu stakeholder yang memiliki peran untuk memberikan fasilitasi serta memenuhi apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementer yaitu stakeholder yang melaksanakan kebijakan dimana didalamnya ada kelompok sasaran.
- e. Akselerator yaitu stakeholder yang fungsinya mempercepat serta berkontribusi supaya suatu program bisa berjalan sesuai tujuan dan bahkan dapat lebih cepat waktu pencapaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, memakai jenis teknik sampling yakni *Purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Sumber data primer penelitian terdiri dari hasil wawancara. Sementara data sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti website resmi Pemerintah Kabupaten, Perbup No. 41 Tahun 2022, Website resmi Imapres Wonogiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi

Dalam Proses kebijakan terdapat lima tahapan yaitu penyusunan kebijakan publik, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan keempat dalam proses kebijakan publik. Orang yang melaksanakan kebijakan disebut dengan aktor. Menurut Blackman (2003) aktor dikategorikan menjadi aktor primer dan aktor sekunder. Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dimana dalam implementasinya melibatkan banyak aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak aktor yang terlibat dalam Implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

1) Aktor Primer

Aktor primer adalah aktor yang memiliki pengaruh yang

tinggi serta berperan penting dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

a) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya di bidang kepemudaan. Keterlibatan DISPORAPAR dalam implementasi kebijakan ditunjukkan melalui bentuk tindakan nyata dengan keikutsertaannya dalam perumusan regulasi pedoman pelaksanaan kebijakan. DISPORAPAR juga memiliki tingkat pengaruh yang tinggi. Selain itu DISPORAPAR juga memiliki ketertarikan yang tinggi dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan harapan dari DISPORAPAR untuk mewujudkan pemuda Wonogiri yang berkualitas.

b) Imapres Wonogiri (Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri)

Imapres Wonogiri merupakan salah satu aktor yang keberadaannya sudah diakui oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah lainnya dengan dikeluarkannya SK Menkumham RI No AHU-0009210.AH.01.07. Tahun 2022. Imapres Wonogiri memiliki tingkat

pengaruh yang tinggi dalam Implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Selain itu Imapres juga memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Wonogiri dan membantu percepatan pembangunan daerah melalui program kerja pemerintah.

2) Aktor Sekunder

Aktor sekunder adalah aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi aktor sekunder diantaranya:

a) Organisasi Perangkat Daerah

Bentuk keterlibatan OPD dalam implementasi kebijakan ini adalah dengan memberikan fasilitas berupa perizinan bagi penerima penghargaan untuk melakukan kegiatan magang di Pemerintah Daerah sesuai dengan minat mahasiswa. Selain itu, beberapa OPD seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri juga turut terlibat dalam proses seleksi.

b) Pihak Kecamatan

Kecamatan merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki

tugas melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten. Dalam hal tingkat pengaruh yang diberikan masih terbilang rendah dalam mendorong Masyarakat maupun aktor lain untuk meningkatkan jumlah penerima penghargaan tiap tahunnya di setiap kecamatan.

c) Pemerintah Desa

Keterlibatan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan belum terlihat, hal ini ditunjukkan dengan belum terlibatnya semua pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program maupun kegiatan lain untuk percepatan implementasi kebijakan.

d) Media

Kehadiran media massa tentunya sangat diinginkan untuk membantu menyebarkan informasi seputar program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Media massa yang terlibat dalam kebijakan ini diantaranya Radio Giriswara, surat kabar Solopos, Website Pemerintah, Sosial Media Pemerintah, Sosial media Imapres Wonogiri, dan Website Imapres Wonogiri.

e) BPD Jateng

BPD Jateng juga turut terlibat dalam implementasi kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri. BPD Jateng berperan dalam membantu memfasilitasi proses penyaluran dana penghargaan berupa penyediaan kartu ATM. Keterlibatan dan tingkat pengaruh dari BPD Jateng dalam implementasi program ini tidak begitu terlihat. Hal ini karena BPD Jateng hanya terlibat saat proses penyerahan penghargaan saja.

f) PT Azmedia

Azmedia merupakan salah satu Perusahaan swasta yang turut terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Bentuk keterlibatan dari Azmedia sendiri yakni sebagai konsultan IT dalam pembuatan Aplikasi Simapres (Sistem Seleksi Pemuda Berprestasi). Tingkat pengaruh dari pihak swasta masih rendah.

g) Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor yang menjadi kelompok sasaran sekaligus penerima manfaat dari

implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Jika dilihat dari tingkat pengaruh dan keterlibatan masyarakat masih rendah dalam implementasi kebijakan.

B. Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari adanya peran aktor yang terlibat didalamnya. Menurut Nugroho peran aktor diklasifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu, *Policy creator*, fasilitator, koordinator, akselerator, dan implementor.

1) *Policy Creator* (Pembuat Kebijakan).

a. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu instansi pemerintahan di tingkat pemerintah kabupaten yang telah melaksanakan perannya sebagai *policy creator* yakni mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun regulasi yang memuat pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dalam penyusunan

regulasi ini DISPORAPAR dibantu oleh pihak akademisi yang berasal dari alumni penerima penghargaan yakni salah satu dosen Universitas Negeri Semarang (UNNES).

2) Koordinator

Koordinator merupakan aktor yang berperan mengkoordinasi aktor lain dalam implementasi suatu kebijakan.

- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sebagai penanggungjawab program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri juga berperan sebagai koordinator utama. Selain berperan sebagai *policy creator* DISPORAPAR berperan dalam mengkoordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Bentuk koordinasi yang dilakukan dapat berupa memberikan arahan dan menjadi jembatan komunikasi antar aktor lainnya.

3) Fasilitator

Merupakan aktor yang berperan dalam memberikan fasilitas untuk menunjang percepatan implementasi kebijakan.

- a. Bank Jateng, merupakan salah satu Lembaga keuangan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bank Jateng juga turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Peran Bank Jateng dalam implementasi kebijakan ini yakni memfasilitasi proses penyaluran dana bagi para penerima penghargaan mulai dari pembuatan rekening hingga dana masuk ke rekening masing-masing penerima.

- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Bentuk keterlibatan OPD dalam implementasi kebijakan beragam misalnya untuk Dinas Sosial dan Disdukcapil berperan dalam memberikan fasilitas verifikasi dan validasi data calon penerima penghargaan. Sedangkan untuk OPD lain seperti DPMPTSP, Bappeda, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya berperan dalam memberikan fasilitas perizinan bagi para penerima penghargaan untuk melakukan magang guna mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan.

4) Akselerator

Merupakan aktor yang berperan dalam mempercepat implementasi suatu kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri aktor yang berperan sebagai akselerator diantaranya:

- a. PT Azmedia, merupakan salah satu Perusahaan yang mewakili pihak swasta dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. PT Azmedia berperan sebagai konsultan IT dalam pembuatan aplikasi Simapres (Sistem Seleksi Pemuda Berprestasi) untuk mewujudkan proses seleksi pemuda berprestasi yang transparan dan akuntabel.
- b. Pemerintah kecamatan, merupakan instansi pemerintahan yang memiliki fungsi untuk membina desa/kelurahan. Dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri pemerintah kecamatan memiliki peran untuk membantu menyebarluaskan informasi seputar program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, selain itu pihak kecamatan juga berperan memberikan motivasi kepada para pemuda untuk terus melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Pemerintah Desa, merupakan pemerintahan yang terdekat dengan Masyarakat selain RT/RW. Pemerintah desa juga turut berperan dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Bentuk keterlibatan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan ini yakni dengan membantu menyebarluaskan informasi seputar program penghargaan pemuda berprestasi kepada Masyarakat agar para pemuda termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan.
- d. Media, merupakan aktor yang juga berperan dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Bentuk keterlibatan pihak media tentu saja menyebarluaskan informasi seputar program penghargaan pemuda berprestasi.
- e. Imapres Wonogiri, merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para penerima penghargaan pemuda berprestasi. Selain berperan dalam membantu

mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi seputar program penghargaan pemuda berprestasi, Imapres Wonogiri juga berperan dalam membantu selama proses seleksi penerimaan calon penerima pemuda berprestasi.

5) Implementor

- a. Imapres Wonogiri merupakan penerima manfaat dari adanya kebijakan ini sehingga dalam hal ini Imapres Wonogiri juga disebut sebagai Implementor atau aktor yang berperan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan termasuk didalamnya kelompok sasaran. Peran Imapres Wonogiri dalam implementasi kebijakan ini adalah turut serta dalam membantu pemerintah mulai dari proses seleksi penerimaan peserta baru, penyebarluasan informasi seputar program, hingga mewadahi serta menyalurkan minat dan bakat para penerima penghargaan pemuda berprestasi dengan OPD terkait.
- b. Masyarakat, dimana didalamnya terdapat para pemuda merupakan kelompok sasaran dari implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten

Wonogiri. Dalam hal ini Masyarakat juga disebut sebagai implementor karena merupakan kelompok sasaran dari sebuah kebijakan.

C. Model Hubungan Antar Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri

Sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat didalamnya. Adanya komunikasi antar aktor tersebut nantinya akan membentuk sebuah hubungan antar aktor. Dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri hubungan antar aktor yang terjalin adalah sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Wonogiri dengan Imapres Wonogiri. Dalam melakukan koordinasi DISPORAPAR lebih sering memberikan arahan, dan lebih banyak mengambil alih dalam pengambilan keputusan. Sehingga hubungan yang terjalin antara DISPORAPAR Wonogiri dengan Imapres Wonogiri disebut dominasi.

- 2) Hubungan Antara DISPORAPAR Wonogiri dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dalam melakukan koordinasi antara satu dinas dengan dinas lainnya saling berkolaborasi satu sama lain. Terdapat kesetaraan pada hubungan yang ada. Sehingga hubungan yang terjalin antara DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri dengan dinas lain atau OPD disebut kolaborasi.
- 3) Hubungan Antara DISPORAPAR Wonogiri dengan pihak lain (Swasta, Masyarakat, media). Dalam menjalin komunikasi DISPORAPAR saling bekerjasama dengan aktor lain yang terlibat, sehingga hubungan yang terjalin antara DISPORAPAR Kabupaten Wonogiri dengan aktor lain disebut hubungan kolaborasi.
- 4) Hubungan Antara Imapres Wonogiri dengan OPD Lain. Hubungan yang terjalin antara Imapres Wonogiri dengan OPD lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi adalah kolaborasi.
- 5) Hubungan antara Imapres Wonogiri dengan Pihak Lain yang terlibat (Swasta, dan Media). Hubungan yang terjalin antara adalah kolaborasi. Namun dalam hal ini

frekuensi komunikasi keduanya masih jarang dilakukan.

- 6) Hubungan antara Imapres Wonogiri dengan Pihak Kecamatan

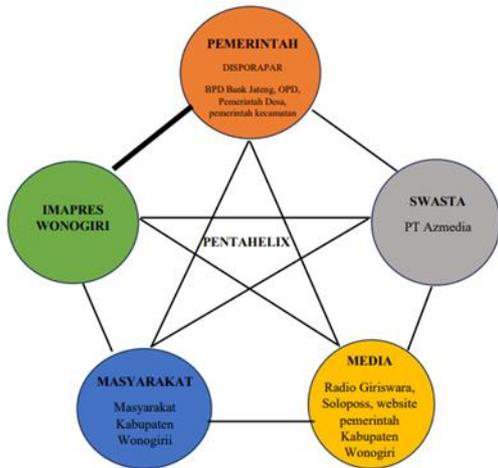
Hubungan antara Imapres Wonogiri dengan pihak kecamatan adalah kolaborasi, artinya tidak adanya yang mendominasi antara keduanya karena keduanya sering melakukan kemitraan dalam bentuk program Imapres Mitra Desa.

D. Model Jaringan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi

Menurut teori helix, dalam model yang terakhir yaitu Penta Helix (Etzkowitz dan Leydesdorf, 1995) dikatakan bahwa terdapat 5 aktor yang tergabung didalamnya yakni Pemerintah, Akademisi, Swasta, Media, dan Masyarakat. Sama halnya dengan implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri, dimana terdapat 5 aktor yang tergabung di dalamnya. Namun akademisi disini tidak terlibat dalam implementasi program, sehingga model *pentahelix* yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri terdiri dari aktor pemerintah, swasta, media, Imapres Wonogiri dan Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan sebuah model jaringan

aktor dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut.



Sumber: Data Olahan Penulis (2023)

Gambar 1.1. Model Jaringan Aktor

Berdasarkan Gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri terdapat 5 aktor yang terlibat yakni Pemerintah (DISPORAPAR, OPD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan) yang diberi tanda lingkaran warna orange, Swasta (PT Azmedia) yang diberi tanda dengan lingkaran warna abu-abu, Media (Radio Giriswara, Solopos, Website Pemerintah) yang ditandai dengan lingkaran warna kuning, Imapres Wonogiri yang ditandai dengan lingkaran warna hijau, dan Masyarakat yang ditandai dengan simbol lingkaran warna biru. Dalam gambar terlihat bahwa hubungan yang

terjadi antara aktor satu dengan aktor lainnya adalah kolaborasi yang ditandai dengan simbol garis lurus berwarna hitam. Sedangkan hubungan yang terjalin antara DISPORAPAR dengan Imapres Wonogiri adalah dominasi yang ditandai dengan simbol garis tebal berwarna hitam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri di atas, maka kesimpulan yang dapat di tarik oleh penulis sebagai berikut:

1. Identifikasi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri

Menurut Blackman (2003) aktor diklasifikasikan menjadi aktor primer dan aktor sekunder. Aktor Primer, aktor yang termasuk dalam kategori aktor primer yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR), serta Imapres Wonogiri. Sedangkan aktor yang masuk dalam kategori aktor sekunder dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri

diantaranya Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Media massa (Radio Giriswara, surat kabar Solopos, Website Pemerintah, Sosial Media Pemerintah, Sosial media Imapres Wonogiri, dan Website Imapres Wonogiri), BPD Jateng, PT Azmedia, dan Masyarakat.

2. Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan klasifikasi peran aktor menurut Nugroho, peran aktor dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, akselerator dan implementor. Dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri peran aktor yang terlibat adalah sebagai berikut.

a. *Policy Creator*, merupakan aktor yang berperan dalam penyusunan regulasi atau kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri, aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan

yakni DISPORAPAR yang dibantu oleh Akademisi (UNNES).

- b. Fasilitator, merupakan aktor yang berperan dalam memberikan fasilitas dalam implementasi kebijakan pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri, dalam implementasi kebijakan tersebut aktor yang berperan sebagai fasilitator yakni Bank Jateng, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil serta OPD lain seperti DPMPTSP, Bappeda, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya.
- c. Koordinator, merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinasi aktor lain dalam implementasi kebijakan. Aktor yang berperan sebagai *coordinator* adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
- d. Akselerator, merupakan aktor yang berperan dalam mempercepat pelaksanaan suatu kebijakan. Aktor yang berperan sebagai akselerator dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di

Kabupaten Wonogiri diantaranya PT Azmedia, Pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, Media, dan Imapres Wonogiri.

- e. Implementor, merupakan aktor yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan termasuk didalamnya kelompok sasaran dan penerima manfaat. Dalam hal ini aktor yang berperan sebagai implementor yakni Imapres Wonogiri dan Masyarakat.

3. Model Hubungan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri

- a. Hubungan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Wonogiri dengan Imapres Wonogiri adalah dominasi, artinya dalam hubungan ini DISPORAPAR Wonogiri sebagai koordinator utama sekaligus penanggungjawab adanya kebijakan ini lebih mendominasi dibandingkan aktor Imapres Wonogiri dalam implementasi kebijakan.
- b. Hubungan Antara DISPORAPAR Wonogiri dengan OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) kolaborasi, artinya dalam hubungan ini tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik.

- c. Hubungan Antara DISPORAPAR Wonogiri dengan pihak lain (Swasta, akademisi, media) adalah kolaborasi, artinya dalam hubungan ini tidak ada yang saling mendominasi satu sama lain.
- d. Hubungan Antara Imapres Wonogiri dengan OPD Lain adalah kolaborasi.
- e. Hubungan antara Imapres Wonogiri dengan Pihak Lain yang terlibat (Swasta, Akademisi, Media) adalah kolaborasi. Namun dalam hal ini frekuensi komunikasi keduanya masih jarang dilakukan.
- f. Hubungan antara Imapres Wonogiri dengan Pihak Kecamatan adalah kolaborasi, artinya tidak adanya yang mendominasi antara keduanya karena keduanya sering melakukan kemitraan dalam bentuk program Imapres Mitra Desa.

4. Model Jaringan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi

Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri

Model jaingan aktor yang terbentuk dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri adalah Pentahelix. Adapun aktor yang terlibat di dalamnya diantaranya Pemerintah (Disporapar, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Seluruh Organisasi Perangkat Daerah), Pihak Swasta (PT Azmedia), Imapres Wonogiri (Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri), Media (Radio Giri swara, Surat Kabar Solopos, Website Pemerintah Kabupaten Wonogiri), dan Masyarakat.

B. Saran

1. Implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri ini telah melibatkan segala sektor dalam pelaksanaannya mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masarakat. Sehingga hal tersebut perlu dipertahankan agar implementasi program kedepannya dapat tetap berjalan dengan baik.
2. Partisipasi Anggota Imapres Wonogiri belum sepenuhnya terlibat aktif dalam Implementasi program. Hal ini ditunjukkan dengan presentase jumlah penerima yang aktif tidak lebih banyak dari jumlah penerima pasif. Sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi oleh DISPORAPAR dengan mengadakan pertemuan rutin antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Wonogiri untuk mendorong partisipasi seluruh anggota Imapres Wonogiri.
3. Dalam Pelaksanaan kebijakan, model hubungan antara DISPORAPAR dan Imapres Wonogiri adalah dominasi. Artinya DISPORAPAR masih mendominasi seluruh kegiatan Imapres Wonogiri. Sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama antar keduanya kearah kolaborasi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, seluruh Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Dr. AP. Dra. Tri Yuniningsih, M.Si selaku Kepala Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing awal yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian, bantuan, waktu, dan kesabaran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Ibu Titik Djumiarti, S.Sos. M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan

masukan terhadap skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.

4. Bapak Amni Zarkasyi Rahman, S.AP. M.Si selaku dosen wali penulis selama kuliah. Terimakasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka, K. G. (2019). Actor-network theory to understand, track and succeed in a sustainable innovation development process. *Journal of Cleaner Production*, 225, 524–540. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.351>
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Anderson, James. (1979). *Public Policy Making*, (Second ed.). New York: Renhart and Winston, New York.
- Blackman, Rachel. 2003. "Project Cycle Management". *Roots : Resourcing Organizations with Opportunities for Transformation and Sharing. Tearfund*.

- Browne dan Wildavsky. 2004 (dalam nurdin dan Usman, 2004:7).
- Di, B., & Wonogiri, K. (2020). Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP 2018_Aldila Rizky Aga_14010118140038.
- Freeman, R. Edward dan McVea, John. (1994). Strategic Management: A Stakeholder Approach to Strategic Management. Working Paper. No. 1 (p.46) Boston: Pitman.
- Henry, Nicholas. (1988). Administrasi Negara dan masalah-masalah kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Hermawan, I. (2019). Jaringan Antar Aktor Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). <http://lib.unnes.ac.id/34124/>
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. Studying Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. New York: Oxford University Press.
- Korten, David C. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latour, Bruno. (2005). Reassembling the Social, An Introduction to Actor-Network Theory. New York : Oxford University Press.
- Riant, Nugroho. (2014). Public Policy. Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manejemen Kebijakan. PT Elex Media Komputindo.
- Ryan, J. (2020). Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Journal Publicuho, 3(4), 491. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15380>
- Singgalen, Y. A. (2021). Aktor-Network Theory and Sentiment Analysis on Regional Development Issues and Politics in Social Media. Jurnal Komunikasi, 13(1), 89. <https://doi.org/10.24912/jk.v13i1.9627>
- Širůček, M., & Galečka, O. (2017). Alternative evaluation of S&P 500 index in relation to quantitative easing. Forum Scientiae Oeconomia, 5(1), 5–18. <https://doi.org/10.23762/fso>